



INDIKATOR STRATEGIS

KABUPATEN BULUNGAN



2023



BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN BULUNGAN



INDIKATOR STRATEGIS

KABUPATEN BULUNGAN



2023



BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN BULUNGAN

Indikator Strategis Kabupaten Bulungan Tahun 2023

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: x + 48 halaman

Penyusun Naskah: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan

Penyunting: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan

Desain Kover: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan

Dicetak Oleh: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan

Diterbitkan oleh: ©Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan.

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Publikasi Indikator Strategis Kabupaten Bulungan Tahun 2023 dapat diterbitkan. Publikasi ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana capaian indikator-indikator strategis selama pembangunan tahun 2022. Indikator-indikator yang terangkum diharapkan berfungsi sebagai input dalam perencanaan daerah.

Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh Badan Pusat Statistik (Data Primer) dan data yang berasal dari sumber lain (Data Sekunder). Informasi dasar yang disajikan meliputi lima indikator makro ekonomi yakni Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harga untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah terlibat hingga publikasi ini dapat diterbitkan kami ucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat terutama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Bulungan.

Tanjung Selor, Oktober 2023
Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Bulungan

Iwan Sugiyanta, ST., MT.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	1
A. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bulungan Tahun 2018-2022.....	3
B. PDRB Per Kapita.....	8
C. Kondisi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.....	9
2. Kemiskinan dan Ketimpangan.....	11
A. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Bulungan.....	13
B. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulungan.....	14
C. Ketimpangan Pengeluaran di Kabupaten Bulungan.....	15
D. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.....	16
3. Indeks Pembangunan Manusia.....	19
A. Hakikat Pembangunan Manusia.....	21
B. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bulunga Tahun 2022.....	22
C. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara.....	25
4. Ketenagakerjaan dan Pengangguran.....	27
A. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja.....	29
B. Karakteristik Penduduk Yang Bekerja.....	31
C. Karakteristik Pengangguran.....	33
D. Perbandingan Tingkat Pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara.....	34
5. Perkembangan Indeks Harga Konsumen.....	37
A. Indeks Harga Konsumen (IHK).....	39
B. Perkembangan Indeks Harga Konsumen di Tanjung Selor Tahun 2022.....	40
C. Perbandingan Indeks Harga Konsumen Antar Kota.....	47

Daftar Tabel

Halaman

1. Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 1.1	Kondisi PDRB Kabupaten Bulungan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022	4
Tabel 1.2	Kondisi PDRB Kabupaten Bulungan Menurut Pengeluaran Tahun 2022...	7
Tabel 1.3	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulungan Tahun 2018-2022	9
Tabel 1.4	Kondisi PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2022	10

2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tabel 2.1	Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2022.....	16
-----------	---	----

3. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 3.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2021-2022	25
Tabel 3.2	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2021-2022	26

4. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Tabel 4.1	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Bulungan, Agustus 2021-Agustus 2022.....	30
Tabel 4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bulungan, Agustus 2021-Agustus 2022.....	30
Tabel 4.3	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2022	34

5. Perkembangan Indeks Harga Konsumen

Tabel 5.1	Inflasi dan Andil Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Tanjung Selor, 2022	41
-----------	---	----

Daftar Gambar

Halaman

1. Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 1.1	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan Menurut ADHB dan ADHK, 2018-2022 (Triliun Rupiah).....	3
------------	--	---

2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Gambar 2.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulungan, Maret 2018-Maret 2022.....	13
Gambar 2.2	Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan (Rupiah/Kapita/Bulan), Maret 2018-Maret 2022.....	14
Gambar 2.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulungan, Maret 2018-Maret 2022.....	15
Gambar 2.4	Gini Ratio Kabupaten Bulungan, 2018-2022.....	21

3. Indeks Pembangunan Manusia

Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulungan, 2018-2022.....	22
Gambar 3.2	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulungan, 2018-2022 (Tahun).....	23
Gambar 3.3	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulungan, 2018-2022 (Tahun).....	24
Gambar 3.4	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bulungan, 2018-2022 (Ribu Rupiah).....	24

4. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Gambar 4.1	Diagram Ketenagakerjaan.....	29
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2022.....	31
Gambar 4.3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2022.....	32
Gambar 4.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2022.....	32
Gambar 4.5	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bulungan, Agustus 2021-Agustus 2022.....	33
Gambar 4.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2022.....	33

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 4.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2022	34
5. Perkembangan Indeks Harga Konsumen		
Gambar 5.1	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Tanjung Selor Tahun 2022 (persen)	40
Gambar 5.2	Inflasi Bulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)	42
Gambar 5.3	Inflasi Bulanan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen).....	43
Gambar 5.4	Inflasi Bulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)	43
Gambar 5.5	Inflasi Bulanan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen).....	44
Gambar 5.6	Inflasi Bulanan Kelompok Kesehatan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen).....	44
Gambar 5.7	Inflasi Bulanan Kelompok Transportasi Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen).....	45
Gambar 5.8	Inflasi Bulanan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen).....	45
Gambar 5.9	Inflasi Bulanan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)	46
Gambar 5.10	Inflasi Bulanan Kelompok Pendidikan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen).....	46
Gambar 5.11	Inflasi Bulanan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen).....	46
Gambar 5.12	Inflasi Bulanan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)	47



1

Pertumbuhan Ekonomi



“

Hampir setengah dari total PDRB Kabupaten Bulungan disumbang oleh sektor “Pertambangan dan Penggalian” serta “Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan”.

”

Pertumbuhan Ekonomi

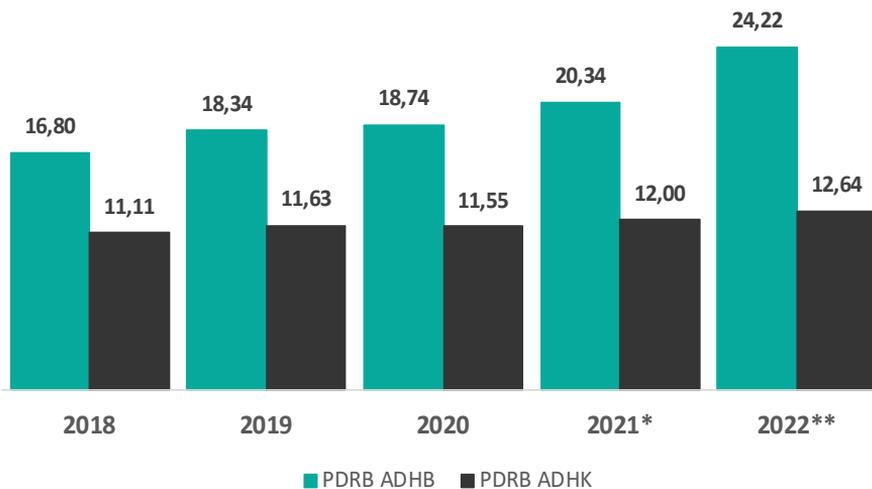
A. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bulungan Tahun 2018-2022

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Dalam lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Bulungan cenderung mengalami pertumbuhan sekitar empat hingga lima persen setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi cenderung bergerak ke arah negatif yang menyebabkan perekonomian berkontraksi hingga -0,70 persen. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan menurunnya kasus Covid-19, kegiatan ekonomi secara perlahan membaik. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang mulai kembali meningkat pada tahun 2021 sekitar 3,95 persen dan terus membaik hingga pada tahun 2022.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga konstan pada tahun 2022, mencapai 12,63 triliun rupiah, naik sebesar 0,63 triliun rupiah dari 12,00 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 persen.

Gambar 1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan Menurut ADHB dan ADHK, 2018-2022 (Triliun Rupiah)



Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sedangkan, jika dilihat atas dasar harga berlaku nilai PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 mencapai 24,22 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 3,88 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 20,34 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya pengaruh inflasi.

Semua lapangan usaha ekonomi tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2022 antara lain: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,70 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,32 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,01 persen. Pertumbuhan ketiga lapangan usaha ini cenderung tinggi di antara lapangan usaha lain yang hanya tumbuh dibawah sembilan persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah selama tahun 2022 adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,38 persen.

Tabel 1.1 Kondisi PDRB Kabupaten Bulungan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022

Lapangan Usaha		PDRB ADHB (Juta Rp)	PDRB ADHK (2010=100) (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (Persen)	Distribusi (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.561.704	2.105.535	4,22	14,70
B	Pertambangan dan Penggalian	7.939.234	3.501.583	6,37	32,78
C	Industri Pengolahan	3.003.678	1.542.390	3,21	12,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.142	6.677	6,84	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.124	10.630	4,66	0,06
F	Konstruksi	2.675.501	1.389.089	2,32	11,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.921.625	1.103.372	9,01	7,93
H	Transportasi dan Pergudangan	1.052.457	577.069	9,32	4,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	320.617	164.237	10,70	1,32
J	Informasi dan Komunikasi	613.682	436.785	7,12	2,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	200.674	109.686	8,83	0,83
L	Real Estat	222.579	166.034	5,55	0,92
MN	Jasa Perusahaan	25.482	14.488	6,66	0,11
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.457.605	787.832	3,01	6,02
P	Jasa Pendidikan	802.434	482.617	5,06	3,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193.940	123.482	1,38	0,80
RSTU	Jasa Lainnya	207.297	117.971	8,95	0,86
PRODUK DOMESTI REGIONAL BRUTO		24.222.775	12.639.474	5,30	100,00

Catatan: Angka PDRB Tahun 2022 masih bersifat sangat sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Dalam lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Bulungan didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, di antaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Bahkan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19, struktur perekonomian di Kabupaten Bulungan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini tergambar dari peranan masing-masing lapangan usaha penyusun PDRB Kabupaten Bulungan yang tidak mengalami perubahan yang besar selama pandemi Covid-19.

Sebagai daerah dengan kekayaan akan batu bara yang melimpah, Kabupaten Bulungan berhasil memanfaatkan sumber daya ini menjadi salah satu kontributor yang mendominasi struktur PDRB. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menyumbang sekitar 32,78 persen terhadap total PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 atau sekitar 7,94 triliun rupiah.

Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 sempat menyebabkan berkurangnya produktivitas perusahaan batubara yang mengakibatkan produksi batubara menjadi turun. Pembatasan akses keluar masuk antar daerah juga menyebabkan turunnya permintaan ekspor untuk komoditas pertambangan, ditambahkan dengan turunnya harga batubara acuan secara global.

Akan tetapi, pada tahun 2021 kondisi berangsur-angsur membaik hingga saat ini. Batubara mulai mengalami peningkatan produksi, diiringi dengan peningkatan harga acuan batubara. Selain itu, harga minyak mentah juga mengalami peningkatan dan peningkatan tersebut berlanjut hingga tahun 2022. Sehingga keadaan ini mengakibatkan pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian meningkat hingga 6,37 persen pada tahun 2022.

Lapangan usaha yang berkontribusi terhadap PDRB tertinggi kedua setelah Pertambangan dan Penggalian adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi kategori ini terhadap PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 14,70 persen atau sebesar 3,56 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, kecuali pada tahun 2021 yang sempat mengalami perlambatan. Pada tahun 2018 tercatat laju pertumbuhan kategori ini sebesar 3,58 persen kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,71 persen kemudian meningkat menjadi 4,01 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 pertumbuhannya melambat menjadi 3,80 persen dan kembali meningkat menjadi 4,22 persen pada tahun 2022.

Hal ini membuktikan bahwa kategori ini yang mencakup tiga subkategori yakni subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian; subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu; serta subkategori Perikanan dapat terus mendorong perekonomian Kabupaten Bulungan meskipun dalam kondisi keterbatasan aktivitas masyarakat secara umum akibat adanya pandemi covid-19.

Selanjutnya, lapangan usaha ketiga terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan adalah Industri Pengolahan. Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 2,35 triliun rupiah menjadi 3,00 triliun rupiah selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi pada kategori ini cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir.

Aktivitas industri pengolahan tumbuh sebesar 3,21 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini terjadi seiring dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan permintaan produk dari masyarakat dikarenakan mulai kembali diselenggarakannya berbagai acara yang sempat

dibatasi pada dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Selain itu, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, konsumsi masyarakat juga mengalami peningkatan. Hal ini mendorong munculnya berbagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di berbagai bidang untuk mencukupi permintaan pasar yang semakin meningkat.

Sebagai wilayah yang terus melakukan pembangunan di berbagai bidang, Kabupaten Bulungan gencar memperbaiki fasilitas dan infrastruktur untuk masyarakat. Hal ini tercermin dari kategori Konstruksi sebagai penyumbang terbesar keempat untuk PDRB Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2022, kontribusi kategori Konstruksi mencapai 2,68 triliun rupiah atau sebesar 11,05 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Bulungan. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 2,53 triliun rupiah. Pada tahun 2022 ini, kategori Konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 2,32 persen.

Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan kategori Konstruksi di Kabupaten Bulungan cenderung berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebagai efek pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengingat status Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, adanya pembangunan kawasan industri di Kecamatan Tanjung Palas Timur mendukung peningkatan pada kategori ini.

Selama lima tahun terakhir, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 7 persen terhadap total PDRB, peringkat kelima kategori dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2022, kontribusi kategori ini mencapai 1,92 triliun rupiah atau sekitar 7,93 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Bulungan.

Secara umum, aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung stabil selama periode 2018-2022 dengan peningkatan kontribusi dan pertumbuhan yang selalu positif setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2022 pertumbuhan kategori ini cenderung melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya meskipun kontribusinya tetap meningkat. Laju pertumbuhan tahun 2020 sebesar 1,18 persen. Salah satu penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat dan penurunan konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi, kondisi tersebut cenderung membaik pada tahun 2021 sehingga pertumbuhannya dapat mencapai 6,39 persen dan pertumbuhannya meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 9,01 persen, kategori dengan pertumbuhan tertinggi ketiga pada tahun 2022. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perbaikan fasilitas publik oleh Pemerintah Daerah, mendukung munculnya berbagai toko dan minimarket di Kabupaten Bulungan sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yakni sebesar 10,70 persen, satu-satunya kategori dengan pertumbuhan di atas sepuluh persen. Kategori ini berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bulungan sebesar 320,61 miliar rupiah atau sekitar 1,32 persen. Laju pertumbuhan kategori ini menurun secara signifikan pada tahun 2022 sebesar -5,45 persen dan kembali tumbuh sebesar 3,28 persen di tahun 2021.

Pada masa pandemi, aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menerima efek yang cukup besar. Tingkat hunian hotel menurun secara signifikan hingga mencapai 70 persen selama tahun 2020. Selain itu, beberapa restoran/warung makan/kedai terpaksa tutup sementara selama periode awal pandemi dan jumlah pengunjung dibatasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Sedangkan, pada tahun 2021 pemerintah sudah mulai melonggarkan aturan sehingga sektor pariwisata dapat tumbuh

kembali melalui kunjungan wisata, peningkatan hunian hotel, serta peningkatan aktivitas usaha penyedia makanan/minuman. Laju pertumbuhan kategori ini juga semakin meningkat signifikan dikarenakan berbagai rangkaian acara yang diselenggarakan di Kabupaten Bulungan dalam rangka perayaan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tanjung Selor pada tahun 2022. Hal ini dapat terlihat dari Tingkat Penghunian Kamar (TPH) hotel yang mengalami peningkatan hingga mencapai 90,32 persen pada tahun 2022.

Tabel 1.2 Kondisi PDRB Kabupaten Bulungan Menurut Pengeluaran Tahun 2022

Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB (Miliar Rp)	PDRB ADHK (2010=100) (Miliar Rp)	Laju Pertumbuhan (Persen)	Distribusi (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.937,55	2.259,81	4,14	16,26
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	156,25	87,25	4,66	0,65
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.444,00	1.265,09	(0,93)	10,09
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.118,04	5,940,06	2,88	45,90
5 Perubahan Inventori	28,14	12,91	-	0,12
6 Net Ekspor	6.538,80	3.074,35	-	26,99
Jumlah 5 Kabupaten/Kota	24.222,78	12.639,47	5,30	100,00

Catatan: Angka PDRB Tahun 2022 masih bersifat sangat sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain menurut pendekatan produksi, perekonomian juga dapat dihitung menurut pendekatan pengeluaran. Secara konsep, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai akhir yang sama namun hanya komponen penyusunnya saja yang berbeda.

Sebagai ibukota provinsi, penduduk Kabupaten Bulungan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena masuknya pendatang dari berbagai wilayah. Masuknya pendatang ini tentunya membawa pengaruh positif terhadap jumlah industri dan perdagangan, penyediaan akomodasi, maupun penyediaan makan minum. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah terutama di kawasan Tanjung Selor juga membantu mendorong nilai pengeluaran pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto.

Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk Bulungan sebanyak hampir 136 ribu jiwa kemudian pada tahun 2022 menjadi sekitar 157 ribu jiwa telah menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai faktor pembentuk PDRB menurut pengeluaran setiap tahunnya. Pada tahun 2018 peran komponen konsumsi rumah tangga sekitar 18,85 persen terhadap total PDRB menurut pengeluaran dan menjadi 16,26 persen pada tahun 2022. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh konsumsi sulit dijaga keberlangsungan dan kestabilannya dan kurang menciptakan nilai tambah dan memicu peningkatan inflasi oleh karena kenaikan harga-harga. Kontribusi ekspor neto juga cukup fluktuatif setiap tahunnya karena dipengaruhi oleh komoditas ekspor dan impor yang cukup beragam. Pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 14,21 persen menjadi 26,99 persen pada tahun 2022. Hal tersebut dapat mengindikasikan kekuatan ekspor komoditas ke luar Bulungan meningkat baik ke luar

negeri maupun ke luar wilayah Bulungan. Hal ini juga dapat mengindikasikan berkurangnya impor komoditas ke dalam wilayah Bulungan.

Peningkatan investasi akan menciptakan dampak pengganda yang dapat mendorong pemanfaatan sumber daya lebih optimal pada kegiatan produksi mendorong perdagangan antar daerah dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Percepatan ini juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah. Hal ini kemudian dapat mendorong pendapatan masyarakat hingga meningkatkan daya beli masyarakat khususnya untuk melakukan konsumsi.

Bagi tenaga kerja, dorongan kegiatan ekonomi melalui investasi dan perdagangan dapat mengurangi pengangguran dan memperbaiki upah yang mereka terima. Kenaikan upah diharapkan tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tetapi juga meningkatkan kemampuan menabung dan/atau berinvestasi. Bagi pemerintah, meningkatnya aktivitas produksi dan perdagangan, upah serta daya beli berarti meningkatnya penerimaan pajak yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peran investasi (komponen pembentukan modal domestik bruto - PMTB) masih dominan di Kabupaten Bulungan karena pembangunan di berbagai sektor baik pemerintahan maupun swasta masih terus berlanjut. Pada tahun 2018 peran PMTB 54,32 persen terhadap total PDRB yang kemudian terus mengalami fluktuasi dan menjadi sebesar 45,90 pada tahun 2022. Pertumbuhan komponen PMTB dengan proporsi komponen yang cukup besar terhadap total PDRB menurut pengeluaran memberikan gambaran bahwa wilayah Kabupaten Bulungan masih cukup menarik untuk dilakukan investasi baik oleh sektor pemerintah maupun swasta. Investasi dan pembangunan ini berupa aset bangunan dan non bangunan. Setelah sempat terhambat pada tahun 2020 dengan nilai pertumbuhan komponen PMTB pada PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Bulungan yang bernilai negatif atau berkontraksi, pada tahun selanjutnya komponen PMTB mulai tumbuh kembali. Kepercayaan investor untuk berinvestasi di wilayah Bulungan meningkat kembali, ditambah lagi dengan adanya pembangunan berbagai proyek strategis nasional.

B. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita per tahun Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 tercatat sebesar 153,70 juta rupiah, meningkat dari tahun 2021 yang hanya sebesar 131,70 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jika dilihat dengan menghilangkan faktor inflasi, secara nominal nilai PDRB per kapita juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 sekitar 77,71 juta rupiah menjadi 80,20 juta rupiah pada tahun 2022. Kenaikan ini tak lepas dari pengaruh dari kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan yang mampu tumbuh searah dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulungan 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Triliun Rupiah)					
• Atas Dasar Harga Berlaku	16,80	18,34	18,74	20,34	24,22
• Atas Dasar Harga Konstan	11,11	11,63	11,55	12,00	12,64
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)					
• Atas Dasar Harga Berlaku	120,95	137,75	123,79	131,70	153,70
• Atas Dasar Harga Konstan	79,97	87,32	76,29	77,71	80,20
Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	2,71	9,19	-12,64	1,86	3,21
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	138,89	133,17	151,36	154,46	157,59
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	2,29	-4,11	13,66	2,05	2,03

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

C. Kondisi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Dinamika ekonomi Indonesia tidak bisa terlepas dari ekonomi global dan regional. Pada tahun 2020, dalam kawasan Asia khususnya Asia Tenggara, kemerosotan ekonomi dialami oleh semua negara. Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan dengan Malaysia, baik secara langsung maupun tidak langsung telah terkena imbas perekonomian Malaysia. Namun, perlahan-lahan perekonomian dunia termasuk Indonesia kembali pulih, dimana hal ini juga berdampak pada perekonomian Kalimantan Utara.

Distribusi PDRB per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2022, Kabupaten Bulungan menyumbang sekitar 17,54 persen terhadap perekonomian Kalimantan Utara, terbesar ketiga setelah Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Kota Tarakan selalu menjadi kota dengan distribusi PDRB terbesar di Provinsi Kalimantan Utara dengan 34,38 persen atau sekitar 47,49 triliun rupiah pada tahun 2022. Kemudian disusul oleh Kabupaten Nunukan sebesar 40,23 triliun rupiah atau 29,12 persen. Kabupaten Malinau berkontribusi terhadap perekonomian Kalimantan Utara sebesar 17,57 triliun rupiah atau 12,72 persen dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 8,61 triliun rupiah atau 6,23 persen.

Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhannya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara tumbuh diatas lima persen. Kota Tarakan menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Utara dengan 5,59 persen. Kemudian Kabupaten Bulungan tertinggi kedua dengan 5,30 persen, diikuti oleh Kabupaten Malinau sebesar 5,27 persen, Kabupaten Nunukan sebesar 5,24 persen, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 5,03 persen.

Keragaman potensi kekayaan alam Kalimantan Utara tidak dapat dipungkiri. Provinsi ini menyimpan begitu banyak kekhasan baik dari segara kontur wilayah, iklim hingga sumber daya alam yang dimiliki. Keragaman tersebut menyebabkan adanya perbedaan sasaran kebijakan untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga perlu adanya analisis mendalam terkait karakteristik setiap daerah tersebut.

Tabel 1.4 Kondisi PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2022

Kabupaten/Kota		PDRB ADHB (Triliun Rp)	PDRB ADHK (2010=100) (Triliun Rp)	Laju Pertumbuhan (Persen)	Distribusi (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Kabupaten Malinau	17,57	8,59	5,27	12,72
2	Kabupaten Bulungan	24,22	12,64	5,30	17,54
3	Kabupaten Tana Tidung	8,61	4,00	5,03	6,23
4	Kabupaten Nunukan	40,23	17,20	5,24	29,12
5	Kota Tarakan	47,49	24,22	5,59	34,38
Jumlah 5 Kabupaten/Kota		138,13	66,65	5,37	100,00
Provinsi Kalimantan Utara		138,72	66,53	5,34	100,00

Catatan: Angka PDRB Tahun 2022 masih bersifat sangat sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada sebagian besar kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, kategori Pertambangan dan Penggalian; dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang terbesar perekonomian di wilayahnya. Di Kabupaten Bulungan, kedua kategori tersebut menjadi dua kategori dengan sumbangan terbesar terhadap perekonomian, diikuti dengan kategori Industri Pengolahan.

Di Kabupaten Malinau, struktur perekonomiannya sedikit berbeda karena kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi yakni sekitar 61,30 persen, diikuti oleh kategori Konstruksi sebesar 11,67 persen, dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,61 persen.

Lain halnya di Kabupaten Tana Tidung, kategori Pertambangan dan Penggalian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB yakni sebesar 44,61 persen, diikuti oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 23,82 persen, dan kategori Konstruksi sebesar 14,17 persen.

Jika di Kabupaten Nunukan, penyumbang terbesar masih bersumber dari kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 58,62 persen dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 17,66 persen. Namun, untuk kontribusi terbesar ketiga dan keempat tidak terlalu jauh berbeda yakni kategori Konstruksi sebesar 5,74 persen dan kategori Industri Pengolahan sebesar 5,47 persen.

Sebagai satu-satunya wilayah dengan status Kota, struktur perekonomian Kota Tarakan berbeda dengan daerah lainnya. Penyumbang terbesar terhadap total PDRBnya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,18 persen. Kemudian diikuti oleh kategori Konstruksi 17,44 persen dan kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,69 persen.



2

Kemiskinan dan Ketimpangan



“

Penduduk miskin di Kabupaten Bulungan tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021, namun masih menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan Utara.

”

Kemiskinan dan Ketimpangan

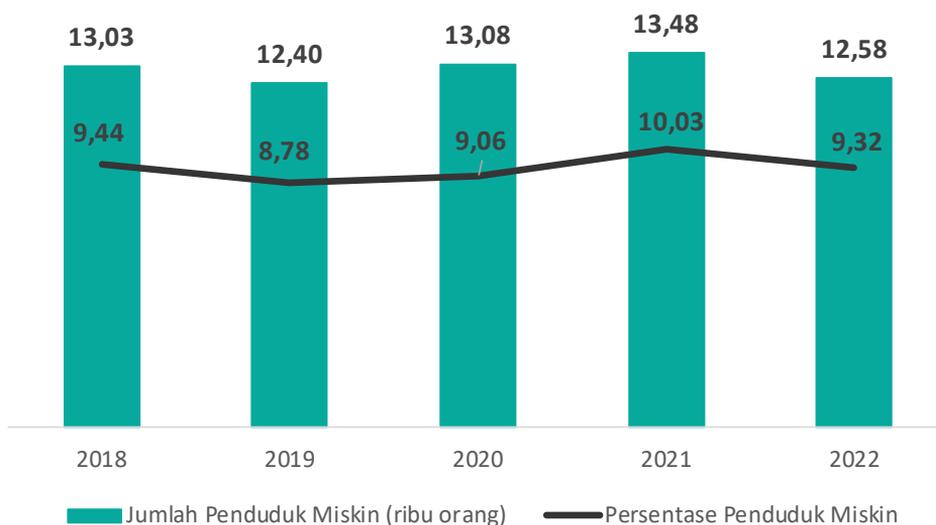
A. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Bulungan

Hampir di setiap daerah, kemiskinan masih menjadi masalah yang penting, tidak terkecuali di Kabupaten Bulungan. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, mengakhiri kemiskinan juga menjadi tujuan pertama dari tujuh belas tujuan yang disepakati dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Selain itu, dalam RPJMN 2020-2024, strategi pengurangan tingkat kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Pengukuran kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan untuk memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Apalagi untuk ekonomi Indonesia yang pernah mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19, tentu berdampak pada kesejahteraan penduduk baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulungan, Maret 2018-Maret 2022



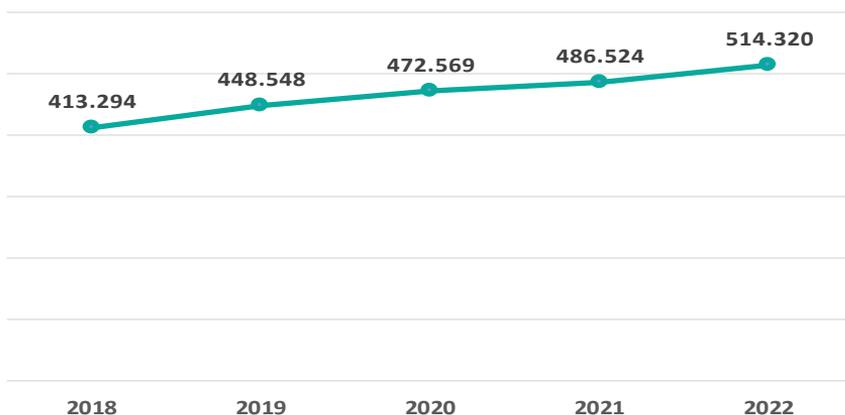
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Kabupaten Bulungan mengalami fluktuasi, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulungan sebesar 13,48 ribu orang atau sekitar 10,03 persen, bertambah sekitar 400 orang dibandingkan Maret 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Namun, seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan kinerja ekonomi, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan. Hal ini dapat terlihat pada Maret 2022 bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulungan sebanyak 12,58 ribu orang atau sekitar 9,32 persen, berkurang sekitar 900 orang dibandingkan kondisi Maret 2021.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan Kabupaten Bulungan Maret 2022 sebesar Rp514.320,- per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021, garis kemiskinan ini meningkat sebesar 5,71 persen. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Bulungan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2 Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan (Rupiah/Kapita/Bulan), Maret 2018-Maret 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

B. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulungan

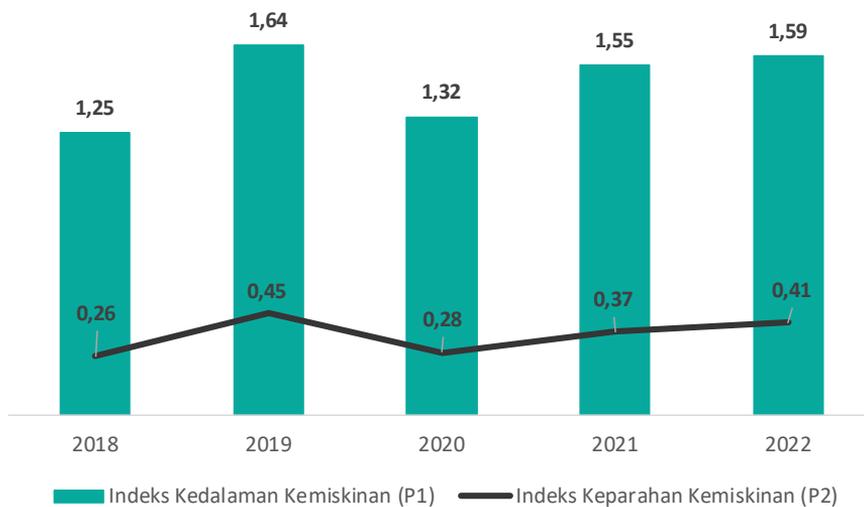
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan berarti semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluarandi antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2021-Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Bulungan mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Maret 2022 sebesar 1,59, meningkat jika dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 1,55. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan Maret 2022 sebesar 0,41, meningkat jika dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar 0,37.

Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Maret 2022 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Gambar 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulungan, Maret 2018 - Maret 2022



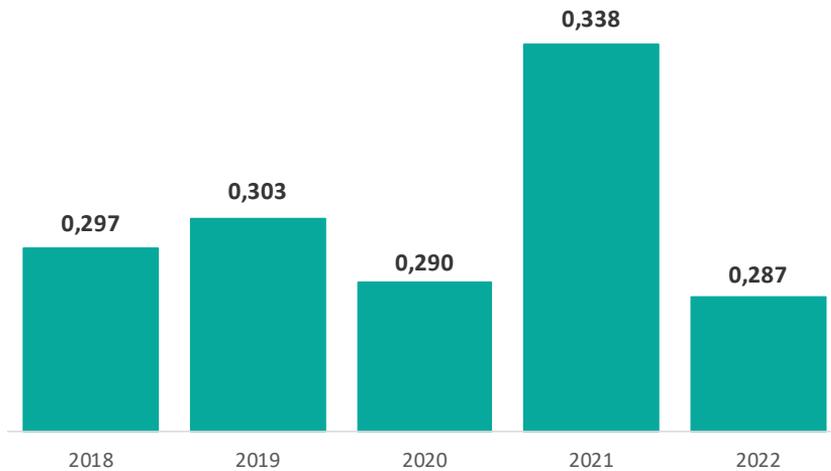
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

C. Ketimpangan Pengeluaran di Kabupaten Bulungan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting untuk dilihat karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Namun, dikarenakan data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan salah satunya adalah koefisien Gini (*Gini Ratio*).

Gini Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Semakin kecil nilai Gini Ratio menunjukkan distribusi pendapatan penduduk yang rata. Sebaliknya, semakin tinggi Gini Ratio menunjukkan distribusi pendapatan penduduk yang semakin timpang. Pada Maret 2022, angka Gini Ratio Kabupaten Bulungan menurun dibandingkan kondisi Maret 2021 dari 0,338 menjadi 0,287. Penurunan Gini Ratio dapat berarti bahwa distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Gambar 2.4 Gini Ratio Kabupaten Bulungan, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

D. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara

Di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan menempati posisi tertinggi dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,32 persen diikuti Kabupaten Malinau sebesar 6,64 persen, Kota Tarakan sebesar 6,30 persen, Kabupaten Nunukan sebesar 6,13 persen, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 4,45 persen.

Namun, jika dilihat dari jumlahnya, Kota Tarakan memiliki penduduk miskin terbanyak yakni sekitar 16,75 ribu orang, diikuti Kabupaten Nunukan sebanyak 12,86 ribu orang, Kabupaten Bulungan sebanyak 12,58 ribu orang, Kabupaten Malinau sebanyak 5,93 ribu orang, dan Kabupaten Tana Tidung sebanyak 1,35 persen.

Tabel 2.1 Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan	Gini Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Malinau	5,93	6,64	0,73	0,11	692.605	0,260
2 Bulungan	12,58	9,32	1,59	0,41	514.320	0,287
3 Tana Tidung	1,35	4,45	0,41	0,07	462.898	0,279
4 Nunukan	12,86	6,13	0,84	0,18	519.231	0,265
5 Tarakan	16,75	6,30	0,73	0,13	773.446	0,267
Kalimantan Utara	50,58	6,77	0,89	0,19	772.914	0,272

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perbedaan kondisi wilayah, kebiasaan masyarakat lokal, serta taraf hidup di masing-masing daerah menyebabkan adanya perbedaan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang tergambar dari garis kemiskinan yang berbeda-beda di setiap daerah. Secara umum, garis kemiskinan tertinggi di Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan yang sebesar Rp 773.446 per kapita per bulan. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Malinau sebesar Rp 692.605, Kabupaten Nunukan sebesar Rp 519.231, Kabupaten Bulungan sebesar Rp 514.320, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp 462.898

Jika dilihat menurut kedalaman dan keparahan kemiskinan, Kabupaten Bulungan adalah daerah dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi di Kalimantan Utara dengan nilai 1,59. Angka ini terlampaui jauh dengan kabupaten/kota lainnya yang hanya bernilai dibawah satu. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Malinau sebesar 0,73, Kabupaten Tana Tidung sebesar 0,41, Kabupaten Nunukan sebesar 0,84 dan Kota Tarakan sebesar 0,73. Begitu pula dengan Indeks Keparahannya, Kabupaten Bulungan masih menjadi wilayah dengan indeks tertinggi di Kalimantan Utara dengan nilai 0,41 diikuti oleh Kabupaten Nunukan sebesar 0,18, Kota Tarakan sebesar 0,13, Kabupaten Malinau sebesar 0,11, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 0,07.

Kondisi ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Kalimantan Utara dapat tercermin dari perbandingan Gini Rasio masing-masing wilayah. Kabupaten Bulungan adalah wilayah dengan ketimpangan tertinggi di Kalimantan Utara dengan Gini Rasio sebesar 0,287. Hal ini sejalan dengan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahannya yang juga tertinggi di wilayah Kalimantan Utara. Adapun Gini Rasio kabupaten/kota lainnya antara lain Tana Tidung dengan nilai 0,279, Kota Tarakan dengan nilai 0,267, Kabupaten Nunukan dengan nilai 0,265, dan Kabupaten Malinau dengan nilai 0,260.



3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



“

IPM Kabupaten Bulungan meningkat menjadi 72,08 pada tahun 2022. Peringkat ketiga di Kalimantan Utara setelah Tarakan dan Malinau.

”

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

A. Hakikat Pembangunan Manusia

Pada era 1960-1970, pelaksanaan pembangunan selalu ditekankan pada pertumbuhan ekonomi (paradigma pembangunan). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini akan membawa kemajuan pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen per tahun untuk jangka panjang dipandang sebagai keberhasilan pembangunan. Sayangnya, penerapan paradigma pertumbuhan ini justru memunculkan berbagai masalah, antara lain kemiskinan dan pengangguran. Teori *trickle down effect* yang sebelumnya diharapkan mampu mengantisipasi masalah tersebut ternyata tidak bekerja. Manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjangkau semua kalangan dan justru meningkatkan kesenjangan.

Adanya berbagai masalah yang timbul selanjutnya melahirkan paradigma baru, yaitu paradigma kesejahteraan. Walaupun demikian, dalam penerapannya masih terdapat berbagai persoalan yang berdampak pada masalah ketidakadilan dan ketidakterpaduan pembangunan.

Berkaca dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, berkembanglah konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan manusia. UNDP dalam Human Development Report 1990 menyebutkan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menegaskan pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus merupakan input pembangunan. Menganggap manusia sebagai aset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan menjadi ide dasar pembangunan manusia. Konsep inilah yang mendasari dibentuknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM terus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan tiga dimensi dasar pembentuk IPM yakni umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (pengeluaran). Dimensi kesehatan dilihat menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan dilihat menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi pengeluaran dilihat menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah ke dalam empat golongan yaitu sebagai berikut:

Sangat Tinggi	IPM \geq 80
Tinggi	70 \leq IPM < 80
Sedang	60 \leq IPM < 70
Rendah	IPM < 60

B. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bulungan Tahun 2022

Pembangunan manusia di Kabupaten Bulungan terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2017, status perkembangan manusia Kabupaten Bulungan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2018-2022, IPM Kabupaten Bulungan meningkat sebesar 0,85 poin, dari 71,23 pada tahun 2018 menjadi 72,08 pada tahun 2022. Setelah mengalami penurunan sebanyak 0,65 poin pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Kabupaten Bulungan terus membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan kinerja ekonomi Bulungan. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikator positif bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bulungan yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga semakin membaik. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bulungan.

Gambar 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulungan, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Merujuk pada RPJPD Kabupaten Bulungan 2010-2025, sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Bulungan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Imtaq), menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta sehat jasmani dan rohani, untuk mewujudkan tenaga kerja, pegawai negeri sipil (PNS) dan peran serta pihak swasta yang profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bulungan telah meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara bertahap untuk tercapainya misi tersebut.

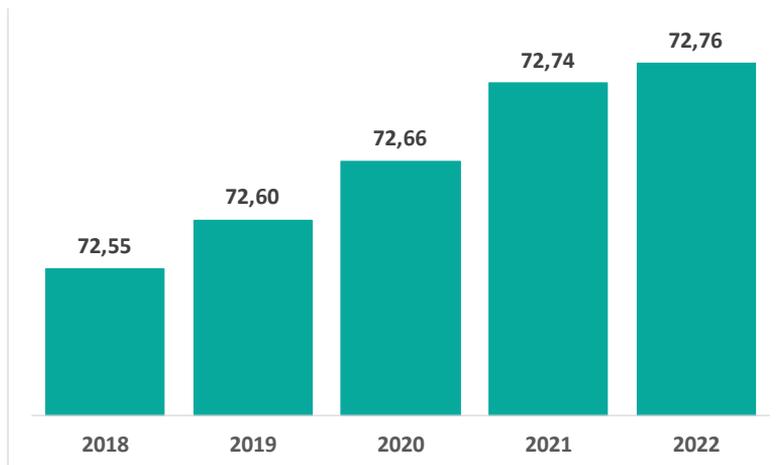
Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Seluruh indikator yang mewakili dimensi IPM mengalami pertumbuhan. Indikator Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) tumbuh lebih tinggi dibandingkan indikator lainnya.

Dalam mengukur dimensi kesehatan, IPM menggunakan indikator Angka Harapan Hidup

(AHH). Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat diartikan adanya keberhasi

Berdasarkan komponen dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulungan selalu mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semakin meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bulungan mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan semakin membaik. Selama periode 2018 hingga 2022, Kabupaten Bulungan telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir sebesar 0,21 tahun dari 72,55 tahun pada 2018 menjadi 72,76 tahun pada 2022. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 72,76 tahun.

Gambar 3.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulungan, 2018-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik

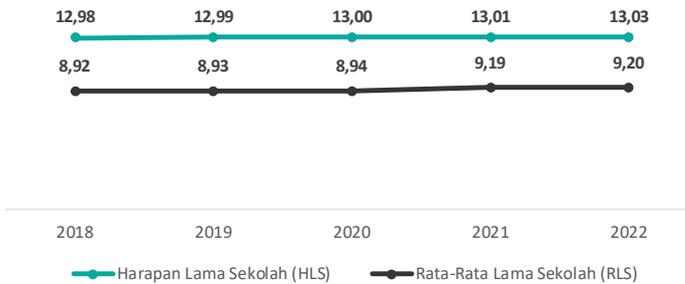
Dimensi pengetahuan pada IPM terbentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Penghitungan harapan lama sekolah mencakup pendidikan untuk penduduk yang berusia mulai dari tujuh tahun ke atas, sementara penghitungan rata-rata lama sekolah dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk meninjau keberhasilan program pendidikan dalam jangka waktu pendek, sedangkan dalam jangka panjang dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas pada suatu daerah.

Selama periode 2018 hingga 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Bulungan meningkat 0,05 tahun dari 12,98 tahun pada 2018 menjadi 13,03 tahun pada 2022. Hal ini dapat diartikan bahwa anak-anak usia tujuh tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma I. Meningkatnya harapan lama sekolah merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang dapat menikmati bangku sekolah dan semakin mudahnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bulungan meningkat 0,28 tahun dari 8,92 tahun pada 2018 menjadi 9,20 tahun pada 2022. Hal ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Bulungan usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan

hingga menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat. Setiap tahunnya indikator pada dimensi pendidikan selalu tumbuh positif. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Bulungan yang lebih baik. Namun, capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Bulungan masih dibawah target wajib belajar yakni 12 tahun. Rata-rata siswa di Kabupaten Bulungan belum dapat mencapai masa kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mendorong kinerja bidang pendidikan untuk lebih giat lagi. Salah satu caranya adalah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya aspek pendidikan formal hingga lulus SMA.

Gambar 3.3 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulungan, 2018-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bulungan mencapai Rp 9,64 juta per tahun. Selama periode 2014-2019, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sekitar Rp 798 ribu atau 9,01 persen. Namun, pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat sempat mengalami penurunan sebesar Rp 529 ribu atau 5,48 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan dampak adanya pandemi COVID-19. Secara rata-rata selama periode 2014-2020 terjadi peningkatan 0,54 persen per tahun, sedangkan pada tahun 2022 pengeluaran per kapita naik 2,31 persen dari tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2018-2022, pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan terjadi peningkatan sebesar Rp 331.000,- atau terjadi pertumbuhan 3,56 persen dalam lima tahun terakhir.

Gambar 3.4 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bulungan, 2018-2022 (Ribu Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik

C. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara

Sesuai dengan fungsinya sebagai suatu indikator, IPM dihitung untuk melihat keterbandingan antar wilayah atau daerah. Hal ini dimaksudkan untuk melihat posisi relatif pembangunan manusia disuatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Untuk itu, dengan membandingkan besaran IPM Kabupaten Bulungan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, maka dapat diperoleh gambaran mengenai posisi relatif pembangunan manusia di Kabupaten Bulungan dibandingkan wilayah lainnya.

Dengan melihat secara rinci terlihat bahwa terdapat tren positif pada besaran-besaran IPM masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara, dimana terdapat peningkatan nilai IPM pada setiap tahunnya. Ini berarti bahwa secara umum terdapat peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Perbedaan terdapat pada tingkat kelajuan peningkatan IPM. Karena IPM tersusun dari beberapa komponen tersebut, maka peningkatan yang berbeda pada ketiga komponen tersebut akan menjadi pembeda tingkat kelajuan peningkatan IPM.

Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	IPM		Selisih IPM		Peringkat IPM	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Malinau	72,32	72,75	0,38	0,43	2	2
2 Bulungan	71,80	72,08	0,70	0,28	3	3
3 Tana Tidung	67,76	68,60	0,79	0,84	4	4
4 Nunukan	66,46	67,16	0,67	0,70	5	5
5 Tarakan	76,23	76,68	0,40	0,45	1	1
Kalimantan Utara	71,19	71,84	0,56	0,64	22	21

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan. Capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan Utara masih di Kota Tarakan sedangkan untuk IPM terendah masih di Kabupaten Nunukan. Jika dilihat berdasarkan statusnya, capaian pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Utara masih sama seperti tahun sebelumnya. Terdapat tiga kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia “tinggi” yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan. Sementara itu, dua kabupaten lainnya, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan masih berstatus “sedang”.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir berkisar antara 71,41 tahun (Nunukan) hingga 74,06 tahun (Tarakan). Sementara pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 12,38 tahun (Tana Tidung) hingga 14,04 tahun (Tarakan), dan rata-rata lama sekolah berkisar antara 8,24 tahun (Nunukan) hingga 10,08 tahun (Tarakan). Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 7,446 juta rupiah per tahun (Nunukan) hingga 11,596 juta rupiah per tahun (Tarakan). Kota Tarakan selalu memiliki capaian tertinggi pada setiap dimensi penyusun IPM, sementara

Kabupaten Nunukan hampir selalu memiliki capaian terendah.

Tabel 3.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Malinau	71,50	13,33	9,41	10.304
2 Bulungan	72,76	13,03	9,20	9.641
3 Tana Tidung	71,51	12,38	8,97	8.012
4 Nunukan	71,41	12,67	8,24	7.446
5 Tarakan	74,06	14,04	10,08	11.596
Kalimantan Utara	72,67	13,06	9,27	9.350

Sumber: Badan Pusat Statistik



4

Ketenagakerjaan dan Pengangguran



“

Jumlah pengangguran di Kabupaten Bulungan meningkat menjadi sekitar 3.245 orang pada tahun 2022.

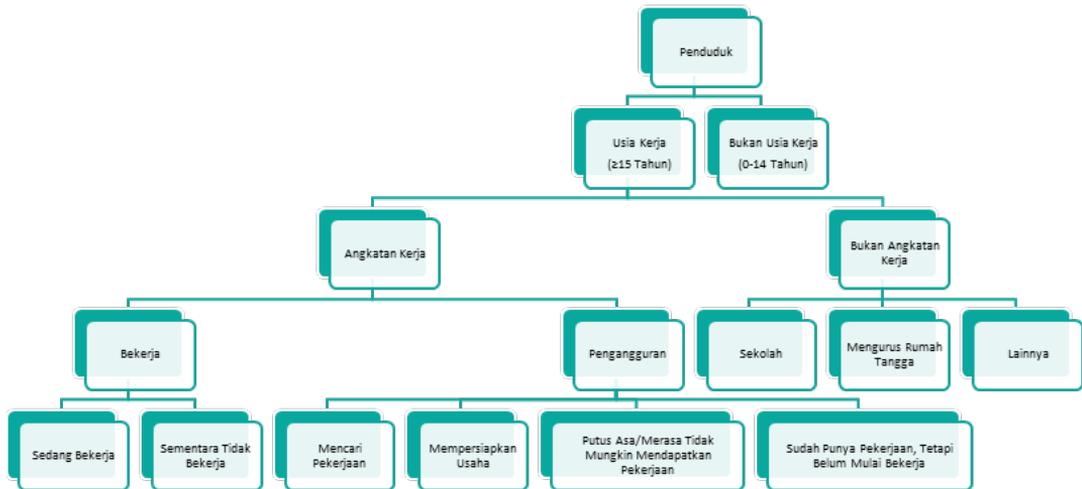
”

Ketenagakerjaan dan Pengangguran

A. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa data ketenagakerjaan, program pembangunan akan sulit dapat dilaksanakan. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang semakin lengkap dan tepat akan memudahkan pemerintah dalam membuat rencana pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Bulungan dibutuhkan sekali data mengenai jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Untuk memahami lebih dalam mengenai skema ketenagakerjaan, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.1 Diagram Ketenagakerjaan



Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan. Penduduk usia kerja Kabupaten Bulungan pada Agustus 2022 sebanyak 100.391 orang, naik sebanyak 940 orang dibandingkan Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja Kabupaten Bulungan merupakan angkatan kerja, yaitu 64.487 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 35.904 orang.

Komposisi angkatan kerja Kabupaten Bulungan pada Agustus 2022 terdiri dari 61.242 orang penduduk yang bekerja dan 3.245 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja Kabupaten Bulungan berkurang sebanyak 3.759 orang. Penduduk bekerja berkurang sebanyak 3.904 orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 145 orang.

Tabel 4.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Bulungan, Agustus 2021 - Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Agt 2021-Agt 2022	
	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	99.451	100.391	940	0,95
Angkatan Kerja	68.246	64.487	-3.759	-5,51
- Bekerja	65.146	61.242	-3.904	-5,99
- Pengangguran	3.100	3.245	145	4,68
Bukan Angkatan Kerja	31.205	35.904	4.699	15,06

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bulungan Agustus 2022 mengalami penurunan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 64,24 persen, turun 4,39 persen poin dibanding Agustus 2021. Angka ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas terdapat sekitar 64-65 orang yang dapat bekerja sedangkan sisanya masuk ke dalam kategori bersekolah ataupun mengurus rumah tangga.

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bulungan, Agustus 2021 - Agustus 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Agt 2021-Agt 2022
	orang	orang	persen poin
(1)	(2)	(3)	(5)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,62	64,24	-4,38
- Laki-Laki	82,19	83,48	1,29
- Perempuan	53,04	42,24	-10,80

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penduduk perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga, atau bersekolah, atau melakukan kegiatan lainnya sebagai kegiatan utama sehari-hari. Hal ini dapat terlihat dari TPAK per jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022, TPAK laki-laki sebesar 83,48 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 42,24 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 1,29 persen poin, sedangkan

TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 10,80 persen poin. Hal ini sejalan dengan pola pikir di lingkungan yang masih menganggap perempuan lebih utama mengurus rumah tangga dibandingkan memiliki kegiatan lain di luar rumah.

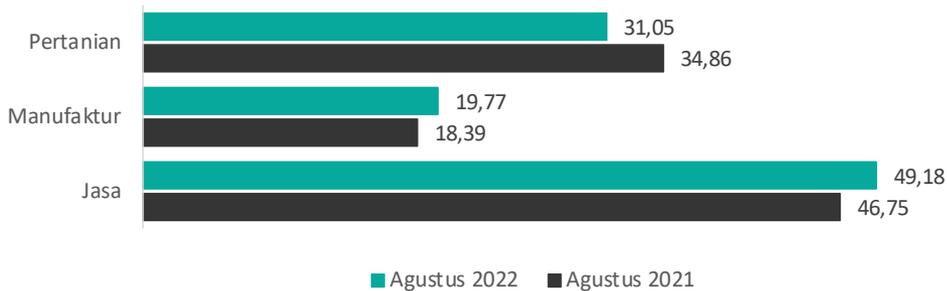
B. Karakteristik Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing kategori. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2022 dibagi menjadi tiga kategori yaitu Pertanian, Manufaktur, dan Jasa. Sektor Jasa merupakan kategori lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 49,18 persen, sedangkan Sektor Manufaktur hanya 19,77 persen menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bulungan.

Apabila dibandingkan dengan Agustus 2021, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu Sektor Jasa (2,43 persen poin) dan Sektor Manufaktur (1,38 persen poin). Sementara itu, Sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar 3,81 persen poin.

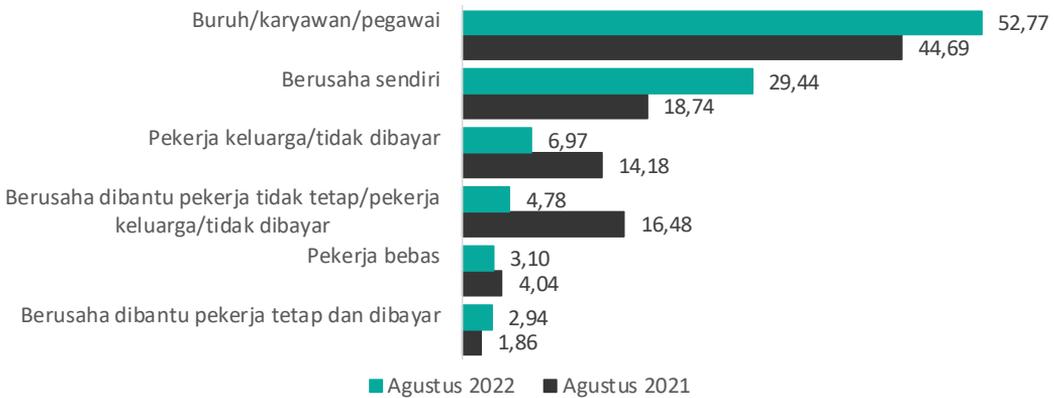
Gambar 4.2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sementara itu untuk melihat kedudukan pekerja dapat dilihat dari status pekerjaannya. Status pekerjaan dibagi menjadi beberapa kategori. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja di Kabupaten Bulungan paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 52,77 persen, sementara paling sedikit berstatus berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar, yaitu sebesar 2,94 persen. Dibandingkan Agustus 2021, status berusaha sendiri dan buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan masing-masing sebesar 10,70 persen poin dan 8,08 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang lainnya mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada berusaha dibantu pekerja tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebesar 11,70 persen poin.

Gambar 4.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2022

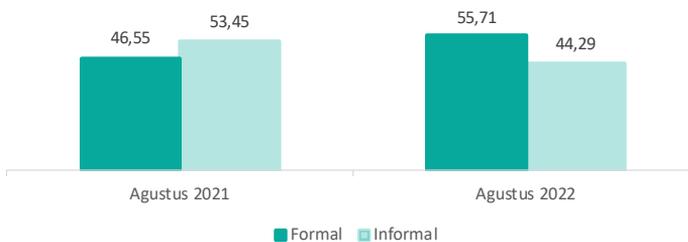


Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 27.126 orang (44,29 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 34.116 orang (55,71 persen). Dibandingkan Agustus 2021, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 9,16 persen poin.

Gambar 4.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2022

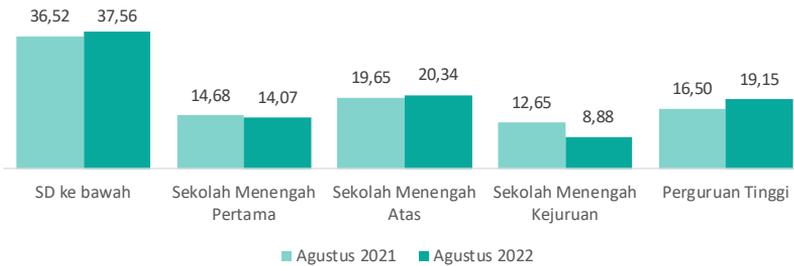


Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja di Kabupaten Bulungan masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 37,56 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Perguruan Tinggi sebesar 19,15 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan periode Agustus 2021.

Dibandingkan dengan Agustus 2021, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan persentase, dengan peningkatan terbesar pada tamatan Perguruan Tinggi, yakni sebesar 2,65 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni sebesar 3,77 persen poin.

Gambar 5.5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bulungan, Agustus 2021-Agustus 2022

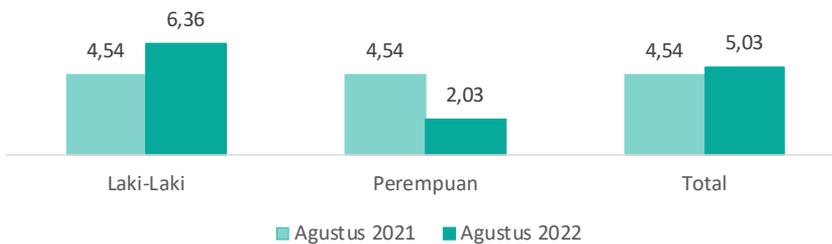


Sumber : Badan Pusat Statistik

C. Karakteristik Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kabupaten Bulungan hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 5,03 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,49 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Gambar 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2022



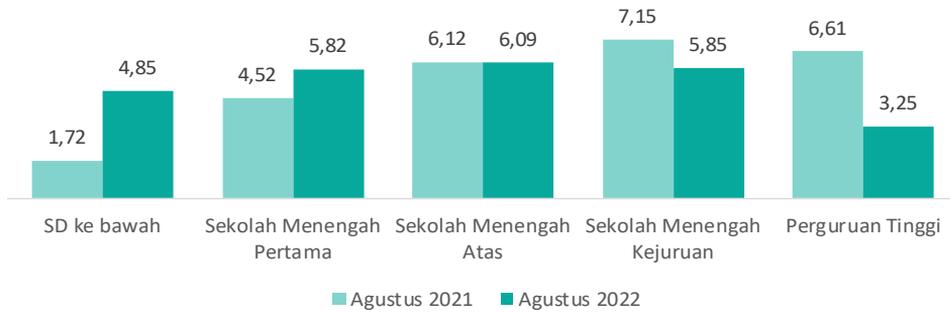
Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 6,36 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,03 persen. TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 1,82 persen poin dibandingkan Agustus 2021, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan 2,51 persen poin dibandingkan Agustus 2021.

Pada Agustus 2022, TPT tamatan Sekolah Menengah Atas merupakan yang paling tinggi

dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 6,09 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah tamatan Perguruan Tinggi, yaitu sebesar 3,25 persen. Dibandingkan Agustus 2021, kenaikan TPT terjadi pada kategori pendidikan SD ke Bawah dan Sekolah Menengah Pertama dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SD ke Bawah sebesar 3,10 persen poin. Sementara itu, penurunan TPT terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Perguruan Tinggi dengan penurunan terbesar pada kategori tamatan Perguruan Tinggi sebesar 3,36 persen poin.

Gambar 4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

D. Perbandingan Tingkat Pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara

Di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi yakni 74,49 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tana Tidung terdapat 74-75 orang yang dapat bekerja. Sedangkan, Kabupaten Bulungan adalah daerah dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terendah yakni 64,24 persen.

Tabel 4.3 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Pengangguran
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Malinau	73,55	3,30	1.592
2 Bulungan	64,24	5,03	3.245
3 Tana Tidung	74,49	3,33	576
4 Nunukan	69,10	2,74	2.916
5 Tarakan	65,49	5,76	7.699
Kalimantan Utara	67,62	4,33	16.028

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kabupaten Nunukan memiliki TPT terendah yakni 2,74 persen yang dapat diartikan bahwa terdapat sekitar 2-3 orang pengangguran dari 100 orang yang termasuk sebagai angkatan kerja. Sebaliknya, Kota Tarakan adalah wilayah dengan persentase pengangguran tertinggi di Kalimantan Utara dengan 5,76 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 5-6 orang yang menganggur. Begitu pula jika dilihat berdasarkan jumlahnya, Kota Tarakan memiliki jumlah pengangguran tertinggi di Kalimantan Utara yakni sebanyak 7.699 orang. Namun, untuk daerah dengan jumlah pengangguran terendah di Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Tana Tidung yakni sebanyak 576 orang.



5

Perkembangan Indeks Harga Konsumen



“

Pada bulan Oktober dan November 2022, Tanjung Selor merupakan kota inflasi dengan inflasi year-on-year tertinggi dari 90 kota inflasi di seluruh Indonesia.

”

Perkembangan Indeks Harga Konsumen

A. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Perubahan harga (inflasi/deflasi) pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat diukur melalui perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen atau masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang dan jasa secara umum. IHK juga sering digunakan untuk pendekatan Indeks Biaya Hidup (cost of living index/CoLI). Penentuan jumlah, jenis dan kualitas dalam paket komoditas barang dan jasa serta bobot timbangannya dalam IHK didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH).

IHK mengukur perubahan pengeluaran/biaya barang dan jasa (paket komoditas) yang biasa dibeli oleh mayoritas rumah tangga dari waktu ke waktu. Dengan kualitas dan kuantitas paket komoditas yang dianggap konstan pada tahun dasar, indeks tersebut semata-mata mencerminkan perubahan harga dan didesain sebagai suatu ukuran dari dampak perubahan harga pada pembelian barang dan jasa. Nilai IHK ini tidak dapat secara langsung menunjukkan perubahan harga komoditas untuk kebutuhan hidup layak pekerja di suatu daerah dikarenakan metode dan paket komoditas yang lebih sederhana. Meskipun demikian informasi dari IHK sangat membantu memberikan gambaran pergerakan harga kebutuhan hidup layak yang terjadi di pasar.

Penghitungan IHK pada tahun 2022 dilaksanakan di 90 kota inflasi. Di Provinsi Kalimantan Utara, terdapat dua kota inflasi yakni Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor. Pemilihan Tanjung Selor sebagai salah satu kota inflasi didasari oleh status wilayah Tanjung Selor yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

IHK secara universal telah diterima sebagai suatu indikator umum dari inflasi karena membantu para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber inflasi sehingga dapat merumuskan kebijakan ekonomi khususnya ukuran anti-inflasi. IHK juga digunakan untuk menyesuaikan data ekonomi yang relevan dari series nilai nominal menjadi series harga konstan dalam rangka mengestimasi pertumbuhan sebenarnya/riil pendapatan nasional dan volume penjualan eceran. Selain itu IHK juga bisa digunakan sebagai deflator PDB/PDRB.

Kegunaan utama lainnya dari IHK adalah untuk menilai daya beli uang. Pada saat harga naik, nilai sebenarnya dari uang atau daya beli menurun sehingga hanya dapat membeli kuantitas yang lebih sedikit dari barang atau jasa yang sama. Hal lain yang berkaitan dengan IHK dan inflasi adalah kenyataan bahwa stabilitas harga juga merupakan barometer stabilitas pertumbuhan ekonomi riil, karena inflasi yang dapat dikendalikan menjamin peningkatan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu. Tetapi harga-harga di Indonesia (termasuk di Kota Tanjung Selor) sangat fluktuatif. Pada waktu-waktu tertentu, harga-harga kebutuhan pokok naik dan turun tergantung pasokan (supply). Dengan permintaan yang tidak berubah, maka demand pull inflation dapat terjadi. Tetapi karena sebagian industri pengolahan juga menggunakan bahan baku impor, maka imported inflation juga merupakan gejala yang selalu mungkin terjadi di Kota Tanjung Selor. Selain itu kenaikan harga juga bisa disebabkan oleh

adanya kenaikan biaya produksi di dalam negeri (cost push inflation), misalnya kenaikan harga BBM.

Di sisi lain, bagi pemegang otoritas moneter terdapat sebuah teori inflasi klasik yang berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar, yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai uang dengan jumlah uang serta nilai uang dan harga. Bila jumlah uang bertambah lebih cepat dari pertambahan barang maka nilai uang akan merosot dan ini sama dengan kenaikan harga. Jadi menurut teori klasik ini, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banyak kredit dibandingkan dengan volume transaksi maka obatnya adalah membatasi jumlah uang beredar dan kredit.

Pengaruh inflasi bagi masyarakat bisa positif dan negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat lebih bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, jika inflasi itu parah, yaitu pada saat inflasi tak terkendali (hiperinflasi) keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu, masyarakat menjadi tidak bersemangat kerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat, para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Secara umum inflasi akan mengurangi daya beli seseorang yang memiliki pendapatan tetap, selain itu juga menyebabkan masyarakat enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Bagi produsen, pengaruh inflasi menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi, sehingga produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, sebaliknya inflasi merugikan jika kenaikan biaya produksi lebih tinggi dari keuntungan yang diperoleh, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Selain itu jika inflasi suatu daerah cukup tinggi hal tersebut mencerminkan ketidakstabilan harga-harga barang dan jasa yang bisa disebabkan oleh sisi produksi ataupun distribusi yang ada. Oleh sebab itu, peran strategis pemerintah daerah sangat besar dalam pengendalian laju inflasi agar kestabilan harga dapat tercapai.

B. Perkembangan Indeks Harga Konsumen di Tanjung Selor Tahun 2022

Inflasi Kota Tanjung Selor selama bulan Januari hingga Desember 2022 (inflasi kalender Desember 2022) mencapai 7,98 persen. Selama tahun 2022 untuk Kota Tanjung Selor terjadi sebelas kali inflasi dan satu kali deflasi. Inflasi bulanan tertinggi terjadi di bulan Juni yaitu 1,78 persen dan mengalami deflasi terendah pada bulan Agustus sebesar -0,71 persen. Untuk lebih rincinya, perkembangan inflasi bulanan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Tanjung Selor Tahun 2022 (persen)



Secara umum, selama tahun 2022 Kota Tanjung Selor terus mengalami inflasi setiap bulannya kecuali pada bulan Agustus yang mengalami deflasi satu-satunya sepanjang tahun. Inflasi tertinggi pada bulan Juni 2022 dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada kelompok Transportasi sebesar 5,46 persen, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,16 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,18 persen, kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,85 persen, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,72 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,30 persen, dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,25 persen.

Kelompok Transportasi dan Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan adanya kenaikan pada tarif pesawat udara dan harga barang-barang pokok seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras.

Dalam rentang tiga tahun terakhir sejak ditetapkan sebagai kota inflasi, Tanjung Selor mencapai inflasi tahun kalender tertingginya pada tahun 2022 yang sebesar 7,98 persen. Padahal dua tahun sebelumnya, inflasi tahun kalender Tanjung Selor berada di rentang target inflasi pemerintah yakni $3 \pm 1\%$. Pada tahun 2020, inflasi tahun kalender Tanjung Selor hanya sebesar 1,96 persen dan di tahun 2021 inflasi tahun kalendernya sebesar 2,33 persen. Fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan harga minyak goreng secara signifikan.

Tabel 5.1 Inflasi dan Andil Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Tanjung Selor, 2022

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahun Kalender 2022	Andil Tahun Kalender 2022
(1)	(3)	(4)
INFLASI TANJUNG SELOR	7,98	7,98
1 Makanan, Minuman dan Tembakau	6,10	1,75
2 Pakaian dan Alas Kaki	0,45	0,03
3 Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	7,05	1,62
4 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	10,25	0,59
5 Kesehatan	0,79	0,02
6 Transportasi	31,62	3,50
7 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-1,16	-0,07
8 Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,26	0,03
9 Pendidikan	0,00	0,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,54	0,04
11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	7,79	0,49

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak sepuluh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan satu kelompok mengalami deflasi selama tahun 2022. Inflasi dan andil tertinggi selama tahun 2022 terdapat pada kelompok pengeluaran Transportasi. Komoditas yang menyumbang inflasi tersebut adalah bahan bakar minyak (BBM) yang mengalami kenaikan harga sepanjang tahun 2022. Hal ini berpengaruh kepada turut meningkatnya tarif angkutan umum seperti pesawat udara dan speedboat.

Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Hal ini membuktikan bahwa seiring berkembangnya teknologi, maka semakin canggih pula telepon seluler yang ditawarkan. Adanya tipe-tipe telepon seluler yang baru mengakibatkan turunnya harga perangkat-perangkat dengan model yang lama.

Untuk melihat pengaruh kelompok pengeluaran terhadap inflasi dengan lebih rinci, dapat dilihat melalui perkembangan inflasi masing-masing kelompok pengeluaran dan komoditas dengan andil dominan per bulan selama tahun 2022.

Gambar 5.2 Inflasi Bulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mulai Januari sampai dengan Desember 2022 ini mengalami inflasi sebesar 6,10 persen atau dapat diartikan bahwa rata-rata harga bahan makanan, minuman, dan tembakau meningkat 6,10 persen dibandingkan dengan rata-rata harga pada Desember 2021. Sepanjang tahun 2022, secara bulanan kelompok ini mengalami peningkatan tertinggi pada bulan Maret sebesar 3,45 persen. Adapun komoditas yang memiliki andil besar dalam inflasi kelompok ini adalah Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Bawang Merah. Selain di bulan Maret, peningkatan tertinggi juga terjadi pada bulan Juni. Inflasi kelompok ini pada bulan Juni sebesar 3,16 persen yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga pada komoditas Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Daging Ayam Ras.

Selain peningkatan harga yang tinggi, pada periode 2022 kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga pernah mengalami penurunan harga yang rendah pada bulan Agustus. Inflasi bulan Agustus pada kelompok ini sebesar -2,99 persen yang dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas Daging Ayam Ras, Cabai Rawit, Minyak Goreng, Beras, dan Sawi Hijau.

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki jarang cenderung tidak mengalami perubahan harga yang signifikan. Selama tahun 2022, perubahan harga pada kelompok ini tidak pernah lebih dari satu persen baik meningkat atau menurun. Kelompok ini mengalami inflasi tertinggi pada bulan Juni sebesar 0,85 persen yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga pada komoditas sepatu anak dan seragam sekolah anak.

Gambar 5.3 Inflasi Bulanan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)

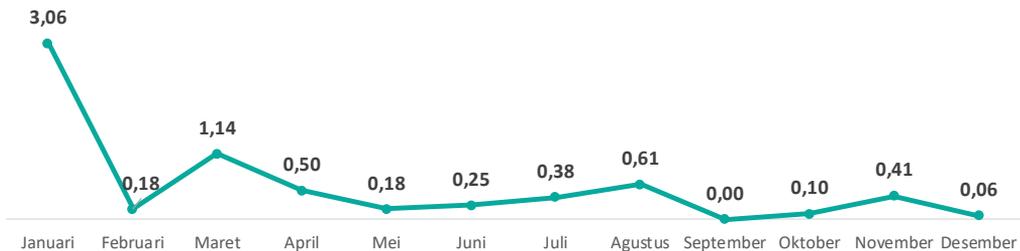


Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Untuk kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga secara rata-rata terus mengalami kenaikan harga di setiap bulannya dan hingga pada akhir 2022 mengalami total inflasi sebesar 7,05 persen selama tahun 2022. Adapun dari Januari hingga Desember, kelompok ini mengalami inflasi tertinggi pada bulan Januari sebesar 3,06 persen dan tidak pernah mengalami penurunan harga.

Inflasi tertinggi yang terjadi di bulan Januari 2022 dipengaruhi oleh perubahan indeks harga konsumen untuk komoditas bahan bakar rumah tangga seperti tabung gas dan minyak tanah. Selain itu di bulan Januari juga terjadi adanya peningkatan tarif sewa/kontrak rumah yang menyebabkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada kelompok ini.

Gambar 5.4 Inflasi Bulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2022, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mengalami inflasi sebesar 10,25 persen, inflasi tahun kalender tertinggi kedua setelah kelompok Transportasi. Secara umum, kelompok ini terus mengalami peningkatan harga dari bulan ke bulan, kecuali pada bulan November yang mengalami deflasi. Dari bulan Januari hingga Desember 2022, kelompok ini mengalami inflasi tertinggi di bulan Maret sebesar 2,18 persen dan deflasi terendah di bulan November sebesar -0,01 persen.

Adapun barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan inflasi pada bulan Maret adalah sabun detergen bubuk/cair dan sabun cair/cuci piring. Sedangkan barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan deflasi pada bulan November adalah sofa.

Gambar 5.5 Inflasi Bulanan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, kelompok Kesehatan mengalami perubahan harga yang berfluktuasi setiap bulannya dimana empat kali mengalami deflasi, tujuh kali mengalami inflasi, dan satu kali rata-rata harga di kelompok ini cenderung stabil. Hingga akhir tahun 2022, kelompok Kesehatan mengalami inflasi tahun kalender sebesar 0,79 persen.

Selama Januari sampai Desember 2022, kelompok Kesehatan mengalami inflasi tertinggi di bulan Juli sebesar 0,45 persen. Kenaikan harga di bulan Juli dipengaruhi oleh adanya kenaikan pada tarif bidan dan harga obat sakit kepala. Sedangkan di bulan April, kelompok ini mengalami deflasi terendah yakni sebesar -0,31 persen yang dipengaruhi oleh adanya penurunan rata-rata harga untuk komoditas obat dengan resep, obat flu, dan vitamin.

Gambar 5.6 Inflasi Bulanan Kelompok Kesehatan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)

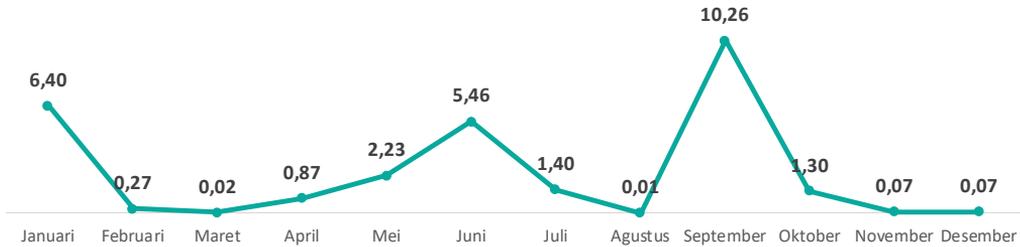


Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Selain kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, kelompok Transportasi juga mengalami peningkatan harga di setiap bulannya. Sepanjang tahun 2022, kelompok ini terus mengalami inflasi hingga pada Desember 2022 inflasi tahun kalendernya mencapai 31,62 persen. Hal ini membuat kelompok Transportasi menjadi kelompok pengeluaran yang memiliki inflasi tertinggi pada tahun 2022.

Inflasi kelompok Transportasi tertinggi terjadi pada bulan September yang mencapai 10,26 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berimbas pada naiknya tarif-tarif angkutan umum lainnya. Fenomena ini juga menggambarkan dari komoditas dengan andil tertinggi pada bulan tersebut yakni Bensin dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Gambar 5.7 Inflasi Bulanan Kelompok Transportasi Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan merupakan salah satu kelompok pengeluaran yang pergerakan harganya tidak sefluktuatif kelompok pengeluaran lainnya. Selama tahun 2022, kelompok ini mengalami inflasi di dua bulan, deflasi di dua bulan, dan delapan bulan lainnya tidak mengalami perubahan harga. Dari bulan Januari hingga Desember 2022, kelompok ini mengalami deflasi sebesar -1,16 persen. Hal ini membuat kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan menjadi satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada inflasi tahun kalender bulan Desember 2022.

Selama tahun 2022, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,06 persen dan 0,03 persen di bulan Februari dan Juli. Namun, kelompok ini juga mengalami deflasi yang cukup dalam pada bulan Januari sebesar -1,04 persen dan -0,22 persen pada bulan Desember. Deflasi yang cukup dalam pada bulan Januari ini disebabkan oleh adanya penurunan biaya administrasi transfer uang dan harga telepon seluler. Penurunan harga telepon seluler ini wajar terjadi karena dengan tipe kualitas yang sama harga telepon seluler cenderung untuk berangsur-angsur turun seiring dengan adanya produk atau tipe kualitas yang lebih baru.

Gambar 5.8 Inflasi Bulanan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022 mengalami inflasi di lima bulan, deflasi di satu bulan, dan sisanya menunjukkan bahwa tidak ada perubahan harga. Inflasi tertinggi terjadi di bulan Agustus dan Januari masing-masing sebesar 0,66 dan 0,65 persen. Inflasi ini terjadi disebabkan oleh adanya perubahan harga pada subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah seperti harga buku tulis bergaris dan tas sekolah. Deflasi terjadi di bulan Februari yang disebabkan oleh adanya penurunan harga pada komoditas raket. Selain itu, secara umum rata-rata harga di kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Gambar 5.9 Inflasi Bulanan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

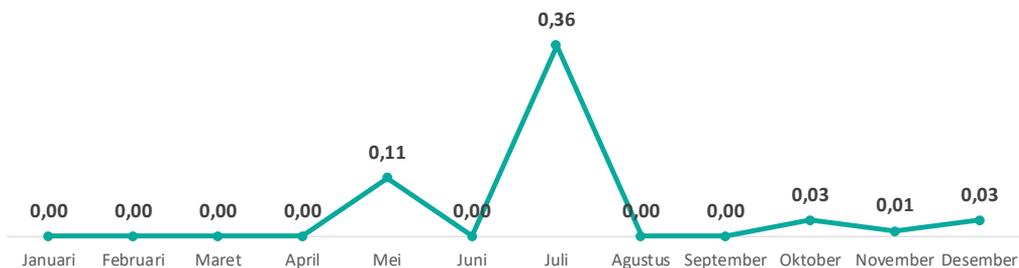
Kelompok pendidikan adalah salah satu kelompok pengeluaran yang jarang mengalami perubahan harga dan hampir tidak pernah mengalami deflasi. Perubahan harga yang terjadi di kelompok Pendidikan biasanya bertepatan pada masa masuk tahun ajaran baru sekolah. Namun, di Kota Tanjung Selor pada tahun 2022 kelompok Pendidikan tidak mengalami perubahan harga sehingga dapat dikatakan bahwa biaya pendidikan di Kota Tanjung Selor cenderung stabil pada tahun 2022.

Gambar 5.10 Inflasi Bulanan Kelompok Pendidikan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Gambar 5.11 Inflasi Bulanan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)

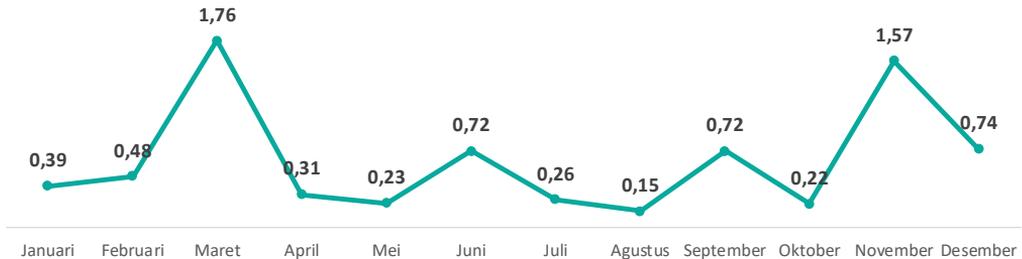


Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada akhir tahun 2022 mengalami inflasi tahun kalender sebesar 0,54 persen. Perubahan harga pada kelompok ini biasanya

berkaitan erat dengan kenaikan harga bahan baku makanan/minuman yang ada pada kategori Makanan, Minuman, dan Tembakau. Selama tahun 2022, kelompok ini mengalami inflasi di lima bulan dan cenderung stabil di bulan-bulan lainnya. Inflasi tertinggi terjadi di bulan Juli sebesar 0,36 persen yang dipengaruhi oleh perubahan indeks harga konsumen pada komoditas es dan martabak.

Gambar 5.12 Inflasi Bulanan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2022 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya selama tahun 2022 secara rata-rata terus mengalami kenaikan harga di setiap bulannya. Hal ini terlihat dari nilai perubahan indeks harga konsumen yang selalu diatas nol. Selama bulan Januari hingga Desember, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 7,79 persen.

Inflasi tertinggi terjadi di bulan Maret sebesar 1,76 persen dan di bulan November sebesar 1,57 persen. Adapun di bulan Maret inflasi pada kelompok ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan, pasta gigi, dan shampo. Sedangkan di bulan November inflasi pada kelompok ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga pada komoditas shampo, tarif gunting rambut pria, dan popok bayi sekali pakai.

C. Perbandingan Indeks Harga Konsumen Antar Kota

Tanjung Selor termasuk kedalam salah satu kota dari 90 kota pantauan Indeks Harga Konsumen di Indonesia. Di Kalimantan Utara, kabupaten/kota yang masuk menjadi kota pantauan inflasi hanyalah di Kota Tanjung Selor dan Kota Tarakan. Sedangkan di Pulau Kalimantan, terdapat 12 kota pantauan inflasi yang tersebar di masing-masing provinsi.

Selama tahun 2022, Tanjung Selor pernah menjadi kota dengan inflasi tahun ke tahun tertinggi se Indonesia yakni pada bulan Oktober dan November. Hal ini disebabkan oleh tingginya kenaikan harga tiket angkutan udara di Tanjung Selor. Selain itu, beberapa kondisi seperti adanya perbaikan jalan lintas provinsi Kaltim-Kaltara dan semakin dangkalnya sungai Kayan menyebabkan terhambatnya arus distribusi barang-barang impor terutama untuk komoditas bahan makanan sehingga mempengaruhi stok komoditas makanan di pasar. Stok pasar yang tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat menyebabkan terjadi kenaikan harga-harga komoditas.

Hingga akhir tahun 2022, Tanjung Selor memiliki tingkat inflasi tahun kalender sebesar 7,98 persen. Angka ini merupakan inflasi tahun kalender tertinggi ketiga di Indonesia. Adapun kota dengan inflasi tahun kalender tertinggi pada tahun 2022 adalah Kotabaru di Kalimantan Selatan sebesar 8,65 persen. Kemudian diikuti oleh Kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara

sebesar 8,35 persen, Kota Tanjung Selor, Kota Bukittinggi di Sumatera Barat sebesar 7,76 persen, dan Kota Bandung di Jawa Barat sebesar 7,45 persen.

Sebaliknya, lima kota pantauan inflasi yang berhasil menahan laju inflasinya dan tercermin dari inflasi tahun kalender yang rendah adalah Kota Sorong di Papua Barat sebesar 3,26 persen, Kota Ternate di Maluku Utara sebesar 3,37 persen, Kota Waingapu di Nusa Tenggara Timur sebesar 3,54 persen, Kota Tarakan di Kalimantan Utara sebesar 3,93 persen, dan Kota Manado di Sulawesi Utara sebesar 0,66 persen.

bangga
melayani
bangsa